IMPLEMENTASI AGENDA BARU PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL & PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

Mataram, 14 September 2017

Outline

1. Tantangan Pembangunan Perkotaan & Rencana Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia
2. Tantangan & Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata
3. Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan & Pariwisata Berbasis Kebudayaan Lokal & Partisipasi Masyarakat

Tantangan Pembangunan Perkotaan & Rencana Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia

1

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019

Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)

Tahun	Rank
2010-2011	44
2011-2012	46
2012-2013	50
2013-2014	38
2014-2015	34
2015-2016	37
2016-2017	41

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia (GCI)

Tahun	Rank
2010-2011	90
2011-2012	82
2012-2013	92
2013-2014	82
2014-2015	72
2015-2016	62
2016-2017	60

Gambaran Daya Saing Global – Indonesia
(sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2014)

TANTANGAN

Disparitas antar wilayah dan kws masih tinggi (KBI dan KTI)

Urbanisasi **yang tinggi** (53% penduduk tinggal pada kaw. Perkotaan)

Daya Saing Nasional
Masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur (termasuk konektivitas)

Pemanfaatan Sumberdaya
belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & energi

DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH TINGGI

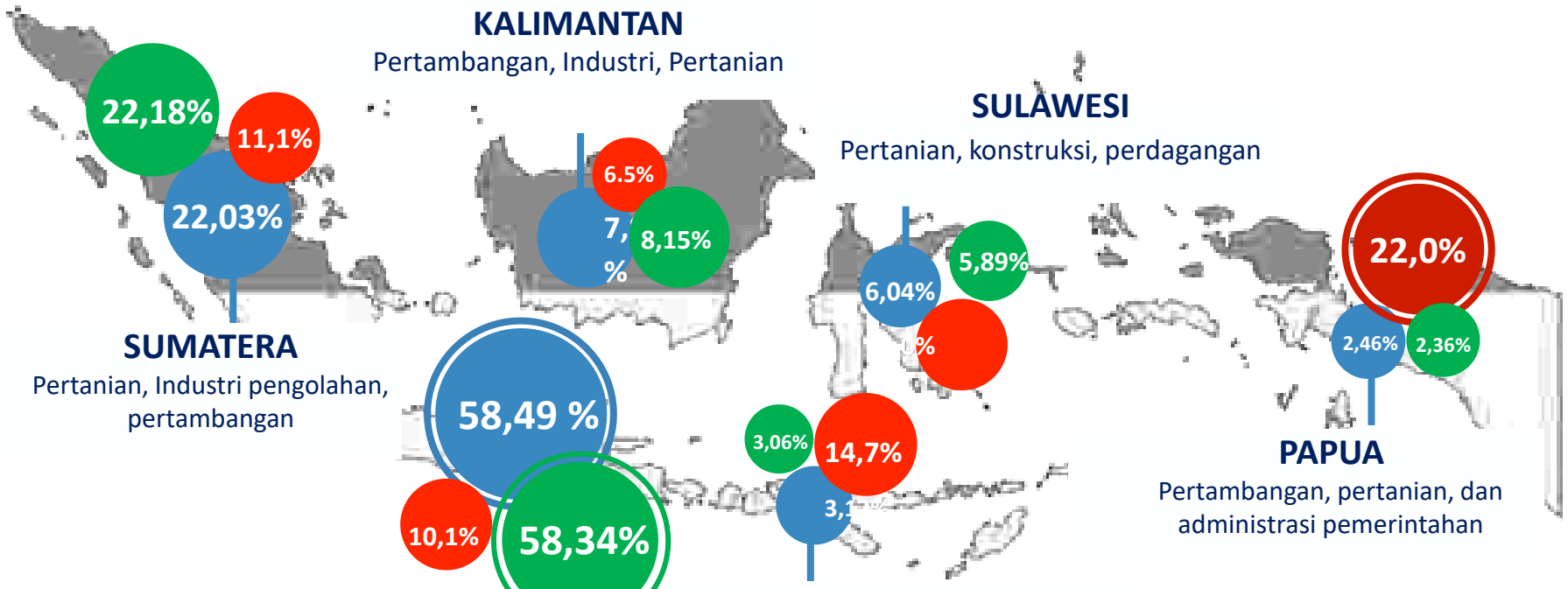

Distribusi terhadap PDB Nasional 2016, YoY
Source: BPS

Distribusi terhadap PDB Nasional 2015, YoY
Source: BPS

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016
Source: BPS

NASIONAL	
Pertumbuhan Ekonomi (Maret 2017)	5,01 %
Tingkat Kemiskinan (September 2016)	10,70 %
Tingkat Pengangguran (Feb 2017)	5,33 %

PERTUMBUHAN PDRB

Pulau	2015	2016
Sumatera	3,5%	4,3%
Jawa	5,5%	5,6%
Bali Nustra	10,3%	5,9%
Kalimantan	1,2%	2%
Sulawesi	8,2%	7,4%
Maluku & Papua	6,6%	7,5%

NAWACITA

TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Membangun dari pinggiran untuk mengatasi kesenjangan antar daerah

Mewujudkan kemandirian ekonomi (ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi)

Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing bangsa melalui peningkatan konektivitas

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dasar

TANTANGAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN

DEMOGRAFI & KOHESI SOSIAL

Populasi Penduduk Perkotaan:

dalam 4 dekade (1970 – 2010),
meningkat 6 kali lipat
49,8% ~ 119,8 juta jiwa (2010)
66,7% ~ 203,4 juta jiwa (2035)
Rata-rata pertumbuhan Penduduk per tahun **1.49%**

Tingkat Urbanisasi:

53,6% ~ 137,5 juta jiwa (2015)

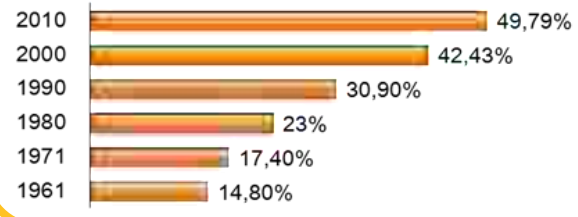

Konsumsi air tanah perkotaan

1.664 juta m3/tahun
*(Setara dengan hampir **2x volume Waduk Jatigede; mampu mengairi ±180.000 Ha sawah**)*

PENATAAN RUANG PERKOTAAN

- Belum ada Vision & KPI penataan kota
- Pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak terkendali sesuai dengan perencanaan, *sprawling*

EKOLOGI PERKOTAAN

Perkotaan berkontribusi **75%** terhadap efek Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan Iklim

0,73-0,76 cm
Kenaikan Muka Air Laut per tahun

TANTANGAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN

TATA KELOLA PERKOTAAN

83,6% RTRW Kota telah ditetapkan dalam Perda

IMB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai Instrumen kontrol land use

Desentralisasi peraturan

berdasarkan prinsip otonomi daerah

EKONOMI PERKOTAAN

Kontribusi perkotan terhadap PDRB Nasional **74%**

Kesenjangan KBI & KTI:

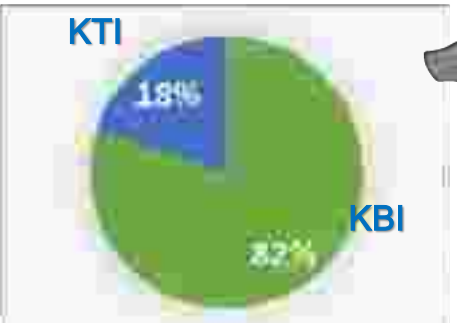

Kontribusi PDRB terhadap PDB 2015

***2011-2014 ICOR (Incremental Capital Output Ratio)*:**

***Indonesia* 6.7**

***Singapore, Thailand, Malaysia, Vietnam* 3-4**

Sumber: ADB, 2015

The lower the ICOR, the more productive the Capital Investment

Jaringan Infrastruktur Regional mendukung Aliran Barang & Jasa dan Jaringan Infrastruktur dalam Kota

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

7,6 juta **BACKLOG PERUMAHAN TAHUN 2015**

67,7%
Cakupan pelayanan penyediaan **air bersih nasional**

± 3,4 Juta Unit
Rumah Tidak Layak Huni (2015)

38,000 ha
Luas Permukiman Kumuh Program 100 – 0 – 100

56%
Cakupan pelayanan **pengelolaan sampah**

Alur

Kebijakan Perkotaan Nasional

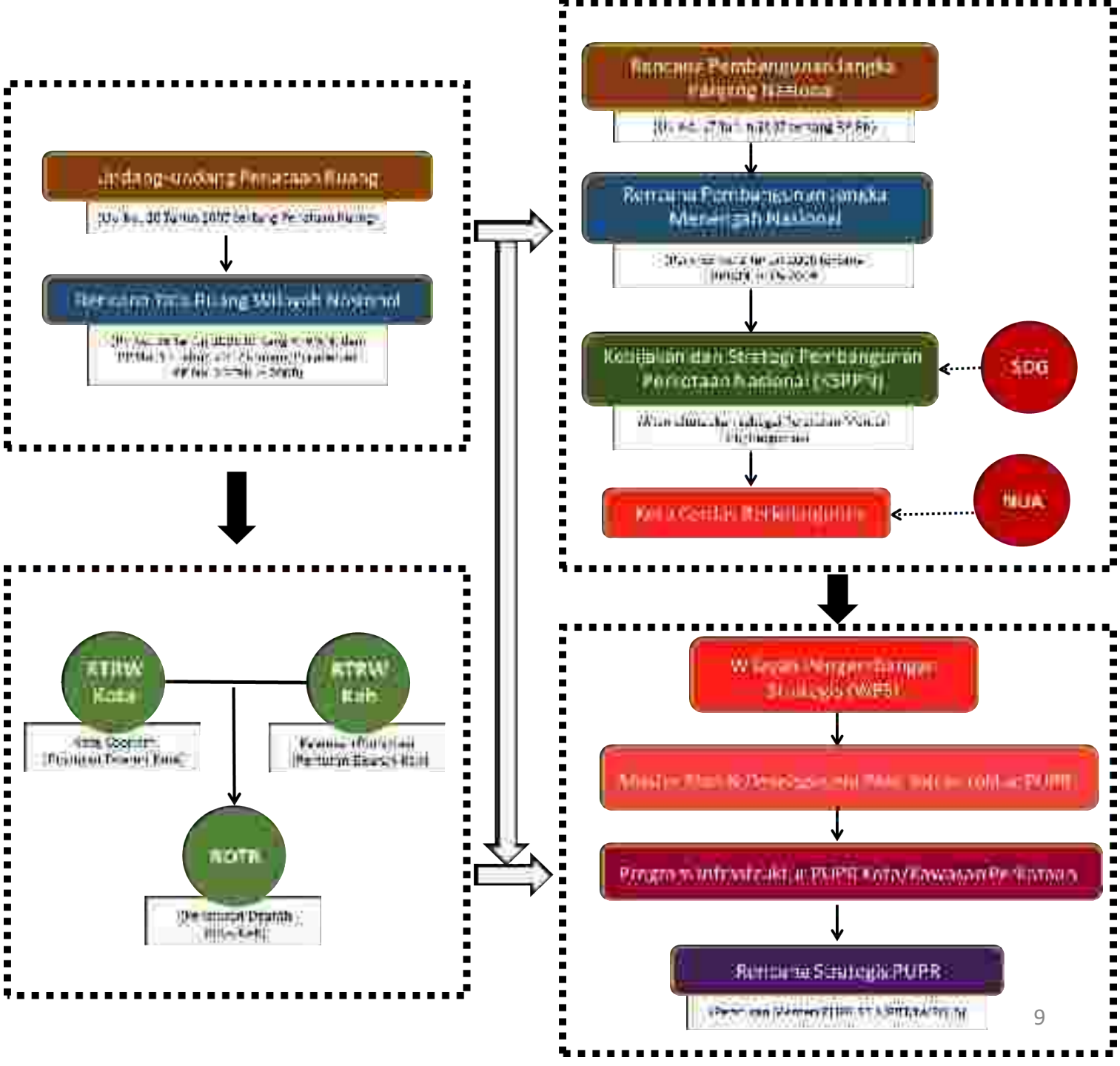

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL
PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing *untuk Kesejahteraan Masyarakat*

- Lingkungan berkualitas
- *Walkable*
- Terjangkau/ekonomis
- Nyaman
- Berbasis budaya
- Konektivitas

- RTH
- Pengelolaan sampah
- Transportasi berkelanjutan
- Pengelolaan air
- Pengelolaan Energi
- Bangunan berkelanjutan

- Tata Guna Lahan Peka Risiko Bencana
- Daya Dukung dan daya Tampung
- Sistem Mitigasi Bencana
- Rencana Aksi Daerah-Adaptasi Perubahan Iklim

- Ekonomi cerdas
- Komunitas cerdas
- Pemerintahan cerdas
- Mobilitas cerdas
- Lingkungan cerdas
- Kehidupan cerdas

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

STRATEGI PENANGANAN
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN

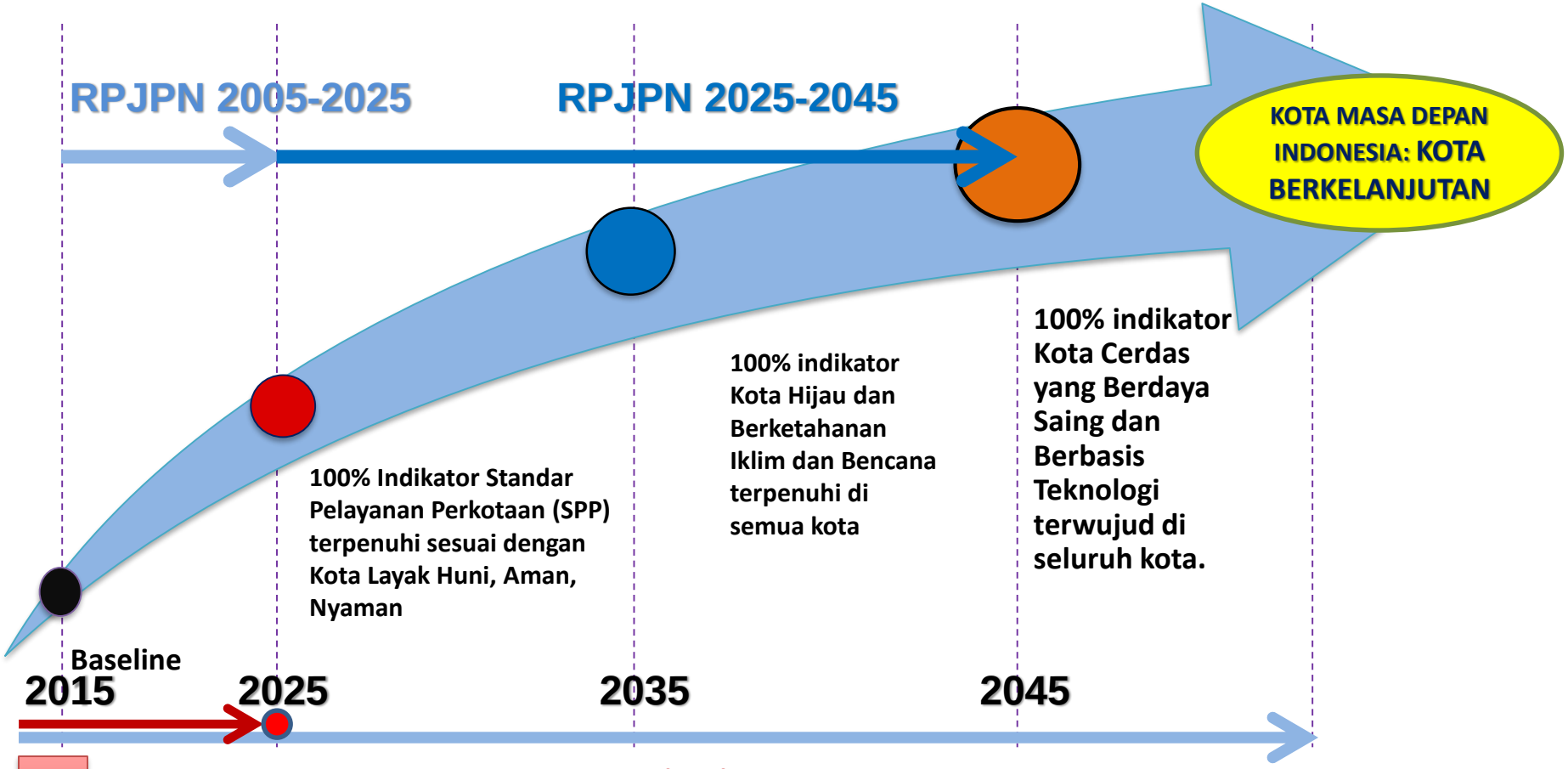

1 **Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), melalui: Indikator Kota Layak Huni, Kota Hijau, Kota cerdas berdaya saing.**

2 **Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)**

100% perkotaan memenuhi fungsinya

3 **100% indikator tata kelola kota berkelanjutan terwujud di seluruh kota.**

SASARAN & STANDAR PELAYANAN KOTA CERDAS BERKELANJUTAN

Kehidupan Cerdas Berkelanjutan

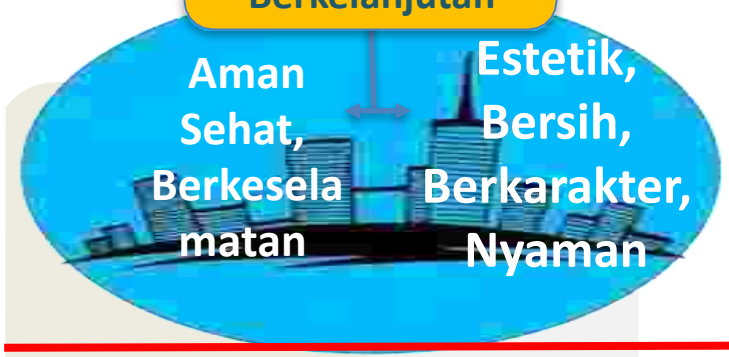

- RTH Publik ≥ 20%
- Luas Jalan ≥ 20%
- Ketersediaan Air dan Akses Sanitasi Layak
- Sesuai Daya Dukung dan Tampung
- Proteksi dan preventif terhadap bencana
- KDB Rendah (<30%), dan KLB Tinggi (di atas 3)
- Perumahan berkualitas

- Lansekap kota yg berkualitas
- Ketersediaan *Landmark* Kota
- Pelestarian kws bersejarah
- Wajah kota yang tertata
- Ketersediaan Ruang Publik yang memadai (± 50%)

Ekonomi dan Mobilitas Cerdas Berkelanjutan

- 40% lahan terbangun untuk aktivitas ekonomi
- Pola penggunaan ruang campuran (mixed landuse, a.l kws. perumahan & Perkantoran)
- Aksesibilitas Tinggi : Infrastruktur Harmoni dengan Guna Lahan
- Penerapan state-of-the-art teknologi (semua terkoneksi dengan TI agar hemat air, energi, & lahan)
- Jejaring Kota (Network City)
- Produktivitas tinggi
- Enterpreneurship disemai
- Infrastruktur TIK kuat
- Sistem transportasi berkelanjutan

Lingkungan Ekologi Cerdas Berkelanjutan

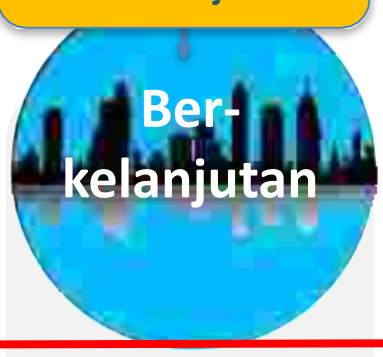

- Pengurangan dampak perubahan iklim
- Pemanfaatan sumber daya terbarukan
- Manajemen sumber daya berkelanjutan
- Proteksi terhadap polusi
- Proteksi lingkungan
- Pengelolaan sampah terpadu (3R)

Tata Kelola dan Komunitas Cerdas Berkelanjutan

- Tata kelola yang baik (semua terkoneksi dan terkontrol)
- Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan
- Rancangan Cerdas
- Transparansi
- Membangun kreativitas masyarakat

Semua elemen terhubung, Terkontrol, Real Time dengan Dukungan Teknologi (sensor, kamera, RFID, Koneksi kabel dan nirkabel dan Ruang kontrol)

AGENDA BARU PERKOTAAN: AREA, ISU, & UNIT KEBIJAKAN

6 Areas	22 Issues	10 Policy Units
Social Cohesion and Equity - Livable Cities	1. Inclusive cities (incl. Pro Poor, Gender, Youth, Ageing) 2. Migration & refugees in urban areas 3. Safer Cities 4. Urban Culture & Heritage	1. Right to the City & Cities for All 2. Socio-Cultural Urban Framework
Urban Frameworks	5. Urban Rules & Legislation 6. Urban Governance 7. Municipal Finance	3. National Urban Policies 4. Urban Governance, Capacity and Institutional Development 5. Municipal Finance and Local Fiscal System
Spatial Development	8. Urban & Spatial Planning & Design 9. Urban Land 10. Urban-rural linkages 11. Public Space	6. Urban Spatial Strategies: Land Market & Segregation
Urban Economy	12. Local Economic Development 13. Jobs and Livelihoods 14. Informal Sector	7. Urban Economic Development Strategies
Urban Ecology and Environment	15. Urban Resilience 16. Urban Ecosystems & Resource Management 17. Cities and Climate Change & Disaster Risk Management	8. Urban Ecology Resilience
Urban Housing and Basic Services	18. Urban Infrastructure & Basic Services, including energy 19. Transport and Mobility 20. Housing 21. Smart Cities 22. Informal Settlements	9. Urban Services & Technology 10. Housing Policies

PRINSIP
AGENDA BARU PERKOTAAN

Ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik

Tidak menelantarkan seorangpun, melalui **penanggulangan kemiskinan**, jaminan atas hak dan peluang yang setara, **keragaman sosial-ekonomi dan budaya**, keterpaduan di dalam ruang kota, memastikan partisipasi masyarakat, **akses yang setara** untuk semua di bidang infrastruktur fisik dan sosial dan layanan dasar, dan perumahan yang layak dan terjangkau

Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati

5
Elemen Kunci
Agenda Baru Perkotaan

Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan untuk Inklusi Sosial dan Penghapusan Kemiskinan

Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Lingkungan dan Berketahanan

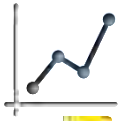

Kemakmuran dan Peluang Perkotaan yang Berkelanjutan dan Inklusif

Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Perkotaan

Membangun Struktur Pemerintahan Perkotaan: Membangun Kerangka Pendukung

TANTANGAN & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

2

TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL

Sumber daya pariwisata, baik alami maupun budaya, belum dioptimalisasi pengembangannya. Sebagai gambaran, jumlah turis asing pada tahun 2013 hanya **8,8 juta**, lebih rendah daripada Malaysia yang mencapai 25,7 juta, dan Thailand yang mencapai 26,5 juta.

Infrastruktur pariwisata seperti konektivitas, masih belum mencukupi. Sebagai gambaran, daya saing infrastruktur **pariwisata Indonesia menduduki peringkat 101**, sementara Malaysia 68, dan Thailand di peringkat 21.

Sumberdaya manusia dan tenaga kerja relatif rendah. Sebagai gambaran, **daya saing bisnis pariwisata Indonesia berada di peringkat 63**, sementara Malaysia 10, dan Thailand 38. dalam hal sumber daya manusia dan tenaga kerja, Indonesia di peringkat 53, Malaysia 30, dan Thailand 29.

Infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung pariwisata belum dikelola secara terpadu, serupa dengan institusi yang terkait pengembangan dan manajemen kawasan pariwisata, yang juga belum dikelola dengan baik.

TARGET DAN STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Jumlah turis asing:

8,8 juta

tahun 2013

Target jumlah turis asing

20 juta

tahun 2019

Perencanaan pengembangan kawasan kota secara terpadu untuk mendukung Kawasan Pariwisata Strategis sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Profesionalisme SDM dan Pengembangan UKM

Pengembangan infrastruktur untuk kawasan strategis pariwisata dan aksesnya

Pengembangan institusi dan dukungan untuk menterpadukan para Stakeholders dalam mencapai target pariwisata nasional

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

PP No 50 tahun 2011

Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (50 DPN)

- **Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (88 KSPN)**
- **Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (222 KPPN)**

9 PILAR PENUNJANG SEKTOR PARIWISATA

DAYA TARIK WISATA

KATEGORI

- Wisata Alam
- Wisata Budaya
- Wisata Hasil Buatan Manusia

SUB KATEGORI

1. Petualangan
2. Bahari
3. Agro
4. Kreatif
5. Kapal Pesiar
6. Kuliner
7. Budaya
8. Sejarah
9. Memorial
10. Ekologi
11. Pendidikan
12. Ekstrim
13. Massal
14. MICE
15. Kesehatan
16. Alam
17. Religi
18. Budaya Kekinian
19. Desa
20. Luar Angkasa
21. Olahraga
22. Kota
23. Relawan

9 PILAR PENUNJANG PARIWISATA

1	Atraksi Wisata	al. Jembatan, Bendungan, Bangunan
2	Aksesibilitas	al. Jalan tol & non-tol
3	Amenitas	al. Penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, penataan kawasan wisata, penanggulangan kumuh, kota hijau, kota pusaka
4	*Branding*	
5	*Advertising*	
6	*Selling*	
7	SDM	
8	Masyarakat	
9	Industri/Usaha	

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019

42 **Seluruh PKN masuk ke dalam WPS**

153 **PKW** Yang tidak masuk ke dalam **WPS, dari 182 PKW**

PELABUHAN
(Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung)

PELABUHAN PERIKANAN
(Cth : Belawan, Cilacap, Bitung)

ASDP
(Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang)

BANDARA
(Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati)

KERETA API
(Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, *Double track* Jawa)

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

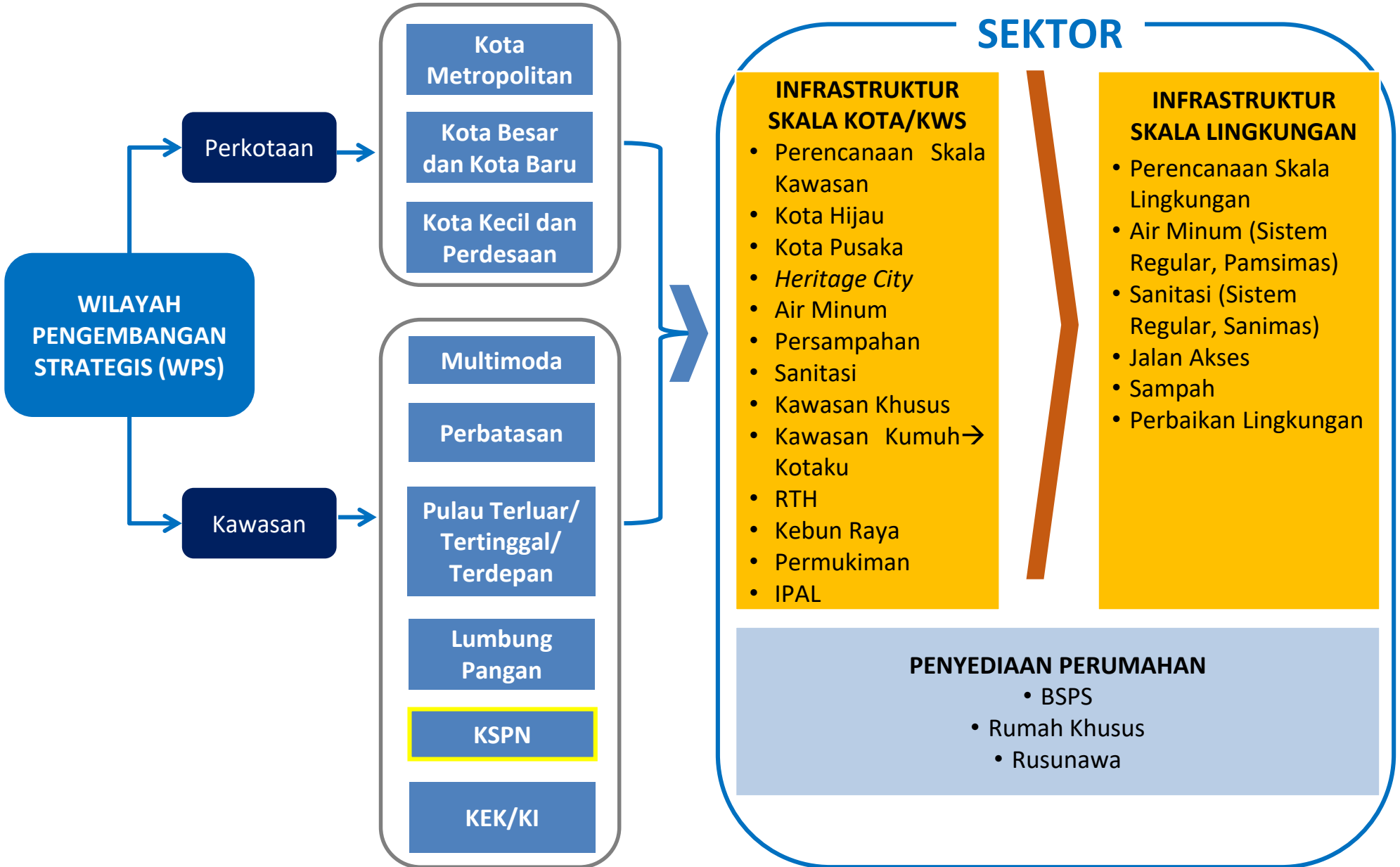

25 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
(TERMASUK 10 KWS PRIORITAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL)

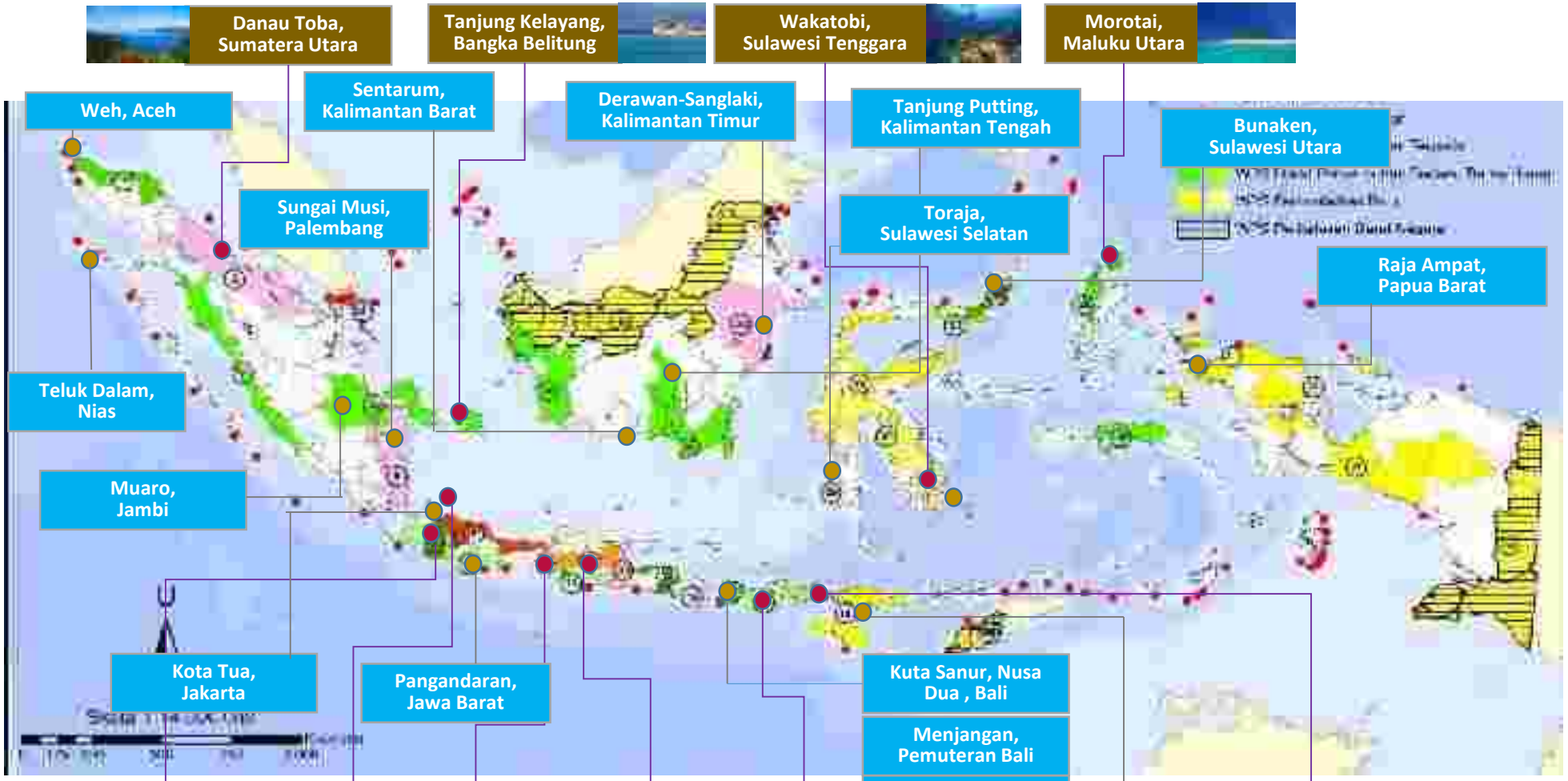

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN & PARIWISATA BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL & PARTISIPASI MASYARAKAT

3

A. **PENATAAN DESA WISATA**
B. **PROGRAM KOTA TANPA KUMUH**
C. **BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)**
D. **PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)**
E. **INFRASTRUKTUR SEBAGAI LANDMARK KAWASAN PERKOTAAN**
F. **PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)**
G. **SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)**
H. **PENATAAN BANGUNAN SESUAI BUDAYA LOKAL**
I. **PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)**
J. **PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)**

A. PENATAAN DESA WISATA

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN DESA WISATA

AMANAT UUD'45 PASAL 28C AYAT 1 :

"*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui* ***pemenuhan kebutuhan dasarnya****, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi* ***meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia***"

UU NO.6 TAHUN 2014 tentang Desa :

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

RPJMN 2015-2019 :

Pembangunan 25 KSPN Prioritas dan pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

ARAHAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PUPR
MENENTUKAN LOKASI DESA WISATA | PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DASAR

Pemerintah Pusat membuat rencana pembangunan dan menentukan lokasi

Pemda sebagai pemberi usulan dalam pembangunan infrastruktur dasar

Kolaborasi dengan K/L lain dalam pemenuhan infrastruktur

IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN DESA WISATA

KOMPONAN PROGRAM DESA WISATA

KOMPONEN -1

Pengembangan Kelembagaan, Strategy dan Kebijakan

KOMPONEN -2

KOMPONEN -2

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan Desa Wisata yang terintegrasi

KOMPONEN -3

Pendanaan Infrastruktur dan Pelayanan Desa Wisata:

- **Infrastruktur skala kawasan termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung KSPN**
- **Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Wisata**

KOMPONEN -4

Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

KOMPONEN -5

Dukungan Program/Kegiatan lainnya antara lain dukungan untuk kondisi darurat bencana

DESA WISATA KAMPUNG CIKADU, TANJUNG LESUNG

Atraksi "Bendrong Lesung" di Kampung Wisata Cikadu dan Belajar Degung Sunda

Canoe Tradisonal di Sungai Cijeudang

Pariwisata berbasis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Atraksi wisata yang disuguhkan berupa aktifitas perjalanan dengan ragam kegiatan aktifitas masyarakat yang unik, edukatif dengan atmosfer dan sentuhan aktifitas alam pedesaan masyarakat Banten.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

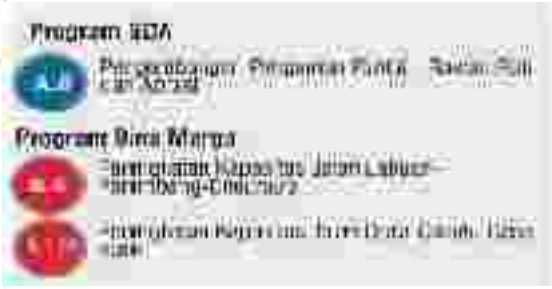

B. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2019

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU

TUJUAN PROGRAM:

Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung **terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan:**

- **Menurunkan luas** permukiman kumuh;
- **Terbentuknya** Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman **(Pokja PKP)** di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- **Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- **Meningkatkan akses ekonomi penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelatihan kewirausahaan**
- **Peningkatan pemahaman masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat** masyarakat dan pencegahan kumuh.

PELAKSANAAN KOTAKU, KAWASAN SANUA - KENDARI

Sebelum

Setelah

KOTAKU
KOTA TANPA KUMUH

C. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

PRINSIP KEGIATAN

Masyarakat sebagai pelaku utama

BSPS sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

BSPS sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat.

Kegotongroyongan dan keberkelanjutan kegiatan.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat.

BSPS tanpa pungutan biaya.

Output kegiatan : rumah layak dan terhuni.

Tidak melewati tahun anggaran.

Tepat sasaran, tepat waktu, tepat pemanfaatan, dan akuntabel.

LOKASI PENERIMA BSPS PADA KSPN PRIORITAS TA. 2018

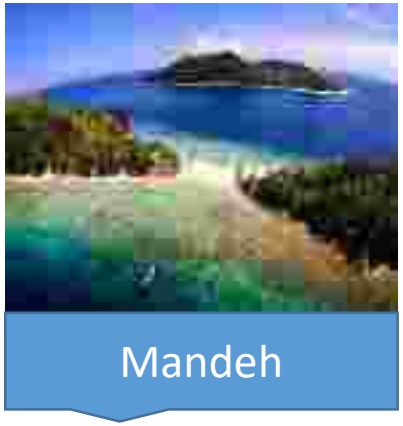

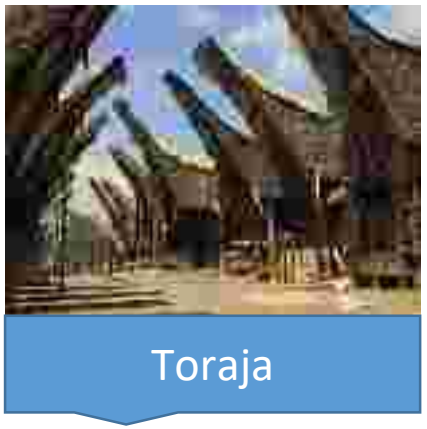

Target Alokasi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejumlah 200 unit per Kabupaten

D.

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN PARIWISATA

1. Pengembangan Potensi Lokal
2. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur permukiman perdesaan;
3. **Peningkatan peran aktif/partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan**
4. Peningkatan peran kelembagaan lokal

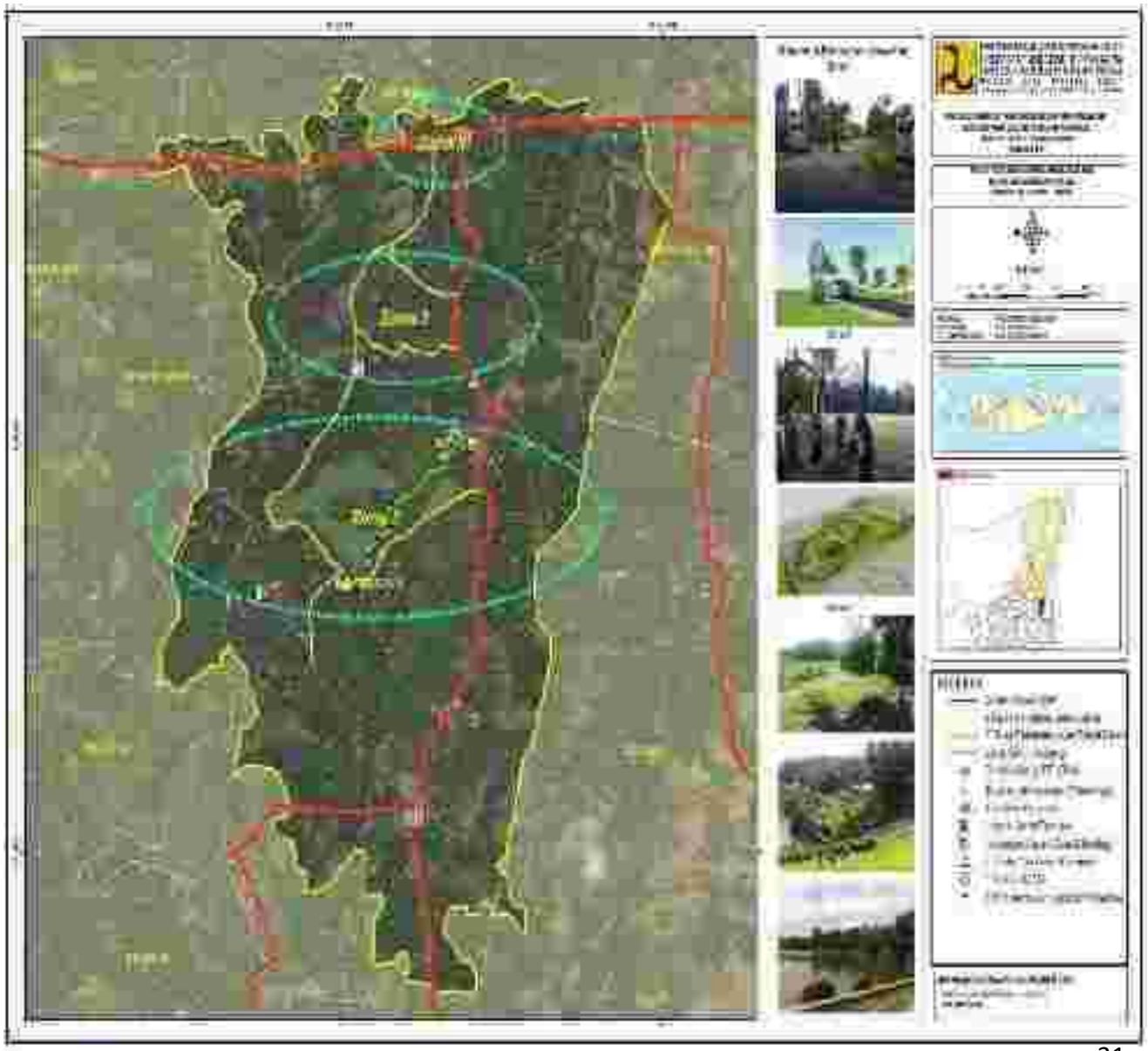

Keterangan:

1. **Zona 1 Pusat Informasi:**
   - Pos Informasi
   - Pos Penjualan tiket
2. **Zona 2 Pusat Perbelanjaan dan Sarana Parkir:**
   - Kios makanan dan souvenir
   - Tempat parkir
3. **Zona 3 Pusat Kegiatan Wisata Agro:**
   - Gazebo
   - Bangunan pengolahan hasil produksi pertanian
   - MCK umum

E.

INFRASTRUKTUR SEBAGAI LANDMARK KAWASAN PERKOTAAN

JEMBATAN SURAMADU & JEMBATAN AMPERA

Infrastruktur selain berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar & konektivitas, sekaligus sebagai landmark objek wisata hasil buatan manusia di kawasan perkotaan

F. PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

TUJUAN PENGEMBANGAN & TARGET

TUJUAN PAMSIMAS

Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses **pelayanan air minum dan sanitasi**

Meningkatkan penerapan nilai dan perilaku **hidup bersih dan sehat**

Mewujudkan target akses 100% air minum dan 100% sanitasi dalam program **100:0:100** pada tahun 2019, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan **pembangunan berbasis masyarakat.**

TARGET 2016-2019

15.000 desa

pengembangan permukiman yang berkelanjutan

27.000 desa

keberkelanjutan pelayanan air minum dan sanitasi peserta **Pamsimas**

Implementasi di Desa Bottotanre, Kab. Bajo - Sulsel

G. SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)

TUJUAN

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat

PENDEKATAN:

- Pemberdayaan Masyarakat
- Keberpihakan kepada Penduduk Miskin
- Otonomi dan Desentralisasi
- Partisipatif
- Keswadayaan
- Keterpaduan Program Pembangunan
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan
- Kesetaraan dan Keadilan Gender

Daftar Provinsi
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)
Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Lokasi		
		2012	2013	2014
Jawa Tengah	18	239	233	239
D.I Yogyakarta	2	46	39	57
Jawa Timur	12	147	147	142
Sulawesi Utara	1	26	22	24
Sulawesi Selatan	1	38	20	24
Jumlah	34	496	461	24

Sumber: Website Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat, DJCK

Pembangunan MCK Komunal di Kec. Wanea Kota Manado.

IPAL Komunal di Kec. Turen Kabupaten Malang

25% IPAL di Kelurahan Sananrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur

H. PENATAAN BANGUNAN YANG SESUAI BUDAYA LOKAL

PROGRAM REVITALISASI KAWASAN PUSAKA OLEH DITJEN CIPTA KARYA

PLBN Motaain

PLBN Entikong

*Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai gerbang Indonesia sekaligus mengenalkan **arsitektur lokalitas budaya** setempat melalui bentuk atap dan bangunan*

Revitalisasi Kota Tua Semarang

Revitalisasi Keraton Surakarta

I.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU

KONSEP PENGEMBANGAN

INOVATIF

Orientasi pada aksi nyata dan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan

PARTISIPASIF

Kolaborasi aktif pemerintah dan masyarakat (gerakan kolektif Kota hijau)

SINERGI

Platform untuk sektor-sektor, sekaligus Pemberdayaan bagi seluruh stakeholder kota

P2KH sebagai solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab tantangan permasalahan kota dan perubahan iklim...

IMPLEMENTASI

Green

OPEN SPACE

Kab. Wonosobo

Kota Semarang

Kab. Tanah Datar

Kab. Sukamara

Kab. Purbalingga

IMPLEMENTASI
Green Community
(Forum Komunitas Hijau)

- **Keterlibatan dan *sense of belonging* masyarakat** yang utamanya dijaring melalui komunitas-komunitas, akan menjadi **motor penggerak utama gerakan hijau (*Agent of Change)*** di kawasan perkotaan dan menjamin **keberlanjutan program kota hijau** di masa depan
- Merupakan sarana mewadahi komunitas2 yang sudah ada untuk saling belajar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian kota
- Pembentukan FKH dimulai pada tahun 2011 dengan kegiatan:
  1. Aksi komunitas hijau:
     a. Membangun kesadaran warga akan atribut-atribut Kota Hijau
     b. Memberi pengetahuan praktis kepada masyarakat tentang kontribusi untuk mewujudkan Kota Hijau
  2. Festival kota hijau:
     a. Mengkampanyekan kegiatan di RTH
     b. Memberi ruang ekspresi kesenian di RTH
     c. Menjadi ajang interaksi masyarakat
     d. Membudayakan kegiatan di taman

J.

PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)

KONSEP PENGEMBANGAN

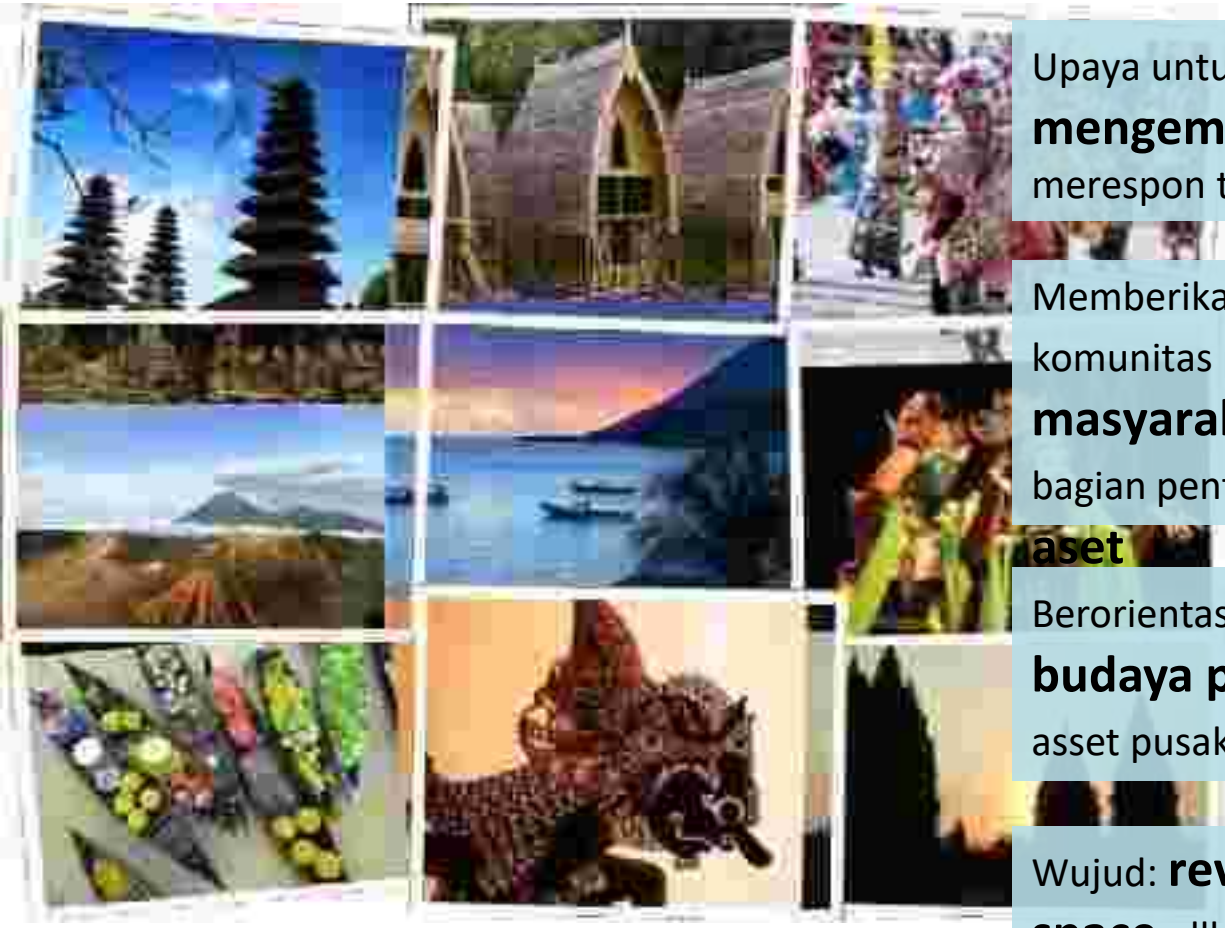

Upaya untuk **melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka** dalam rangka merespon tantangan saat ini dan mendatang...

Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui **kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha** untuk mengambil bagian penting dalam **mengaktifkan kembali aset**

Berorientasi untuk **peningkatan aspek sosial – budaya perkotaan** melalui penataan & pelestarian asset pusaka, serta **pemeliharaan identitas kota**

Wujud: **revitalisasi kawasan, penataan public space**, dll

JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA

IMPLEMENTASI P3KP:
PENATAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ROAD MAP IMPLEMENTASI NUA

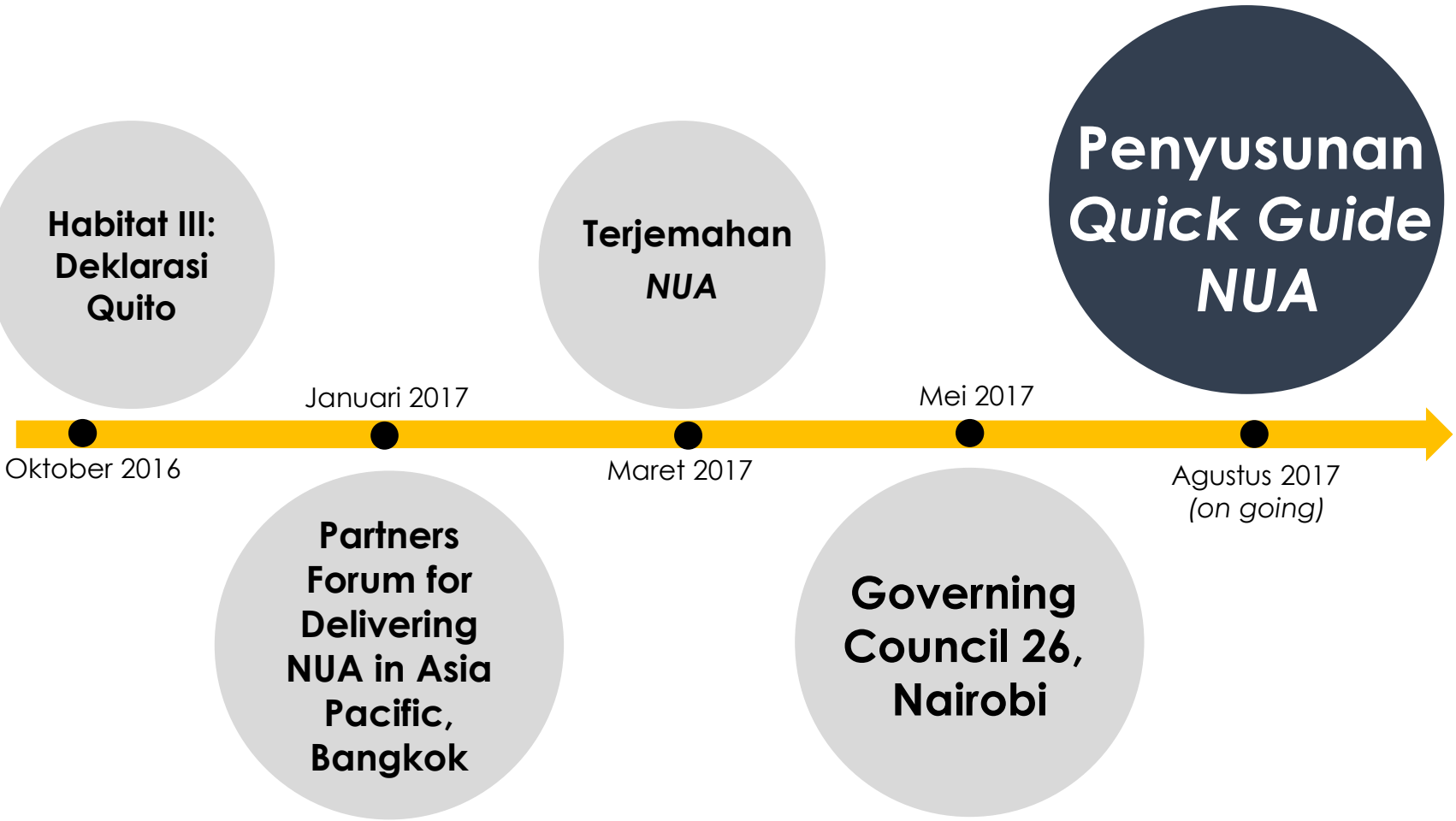

PENYIAPAN IMPLEMENTASI NUA

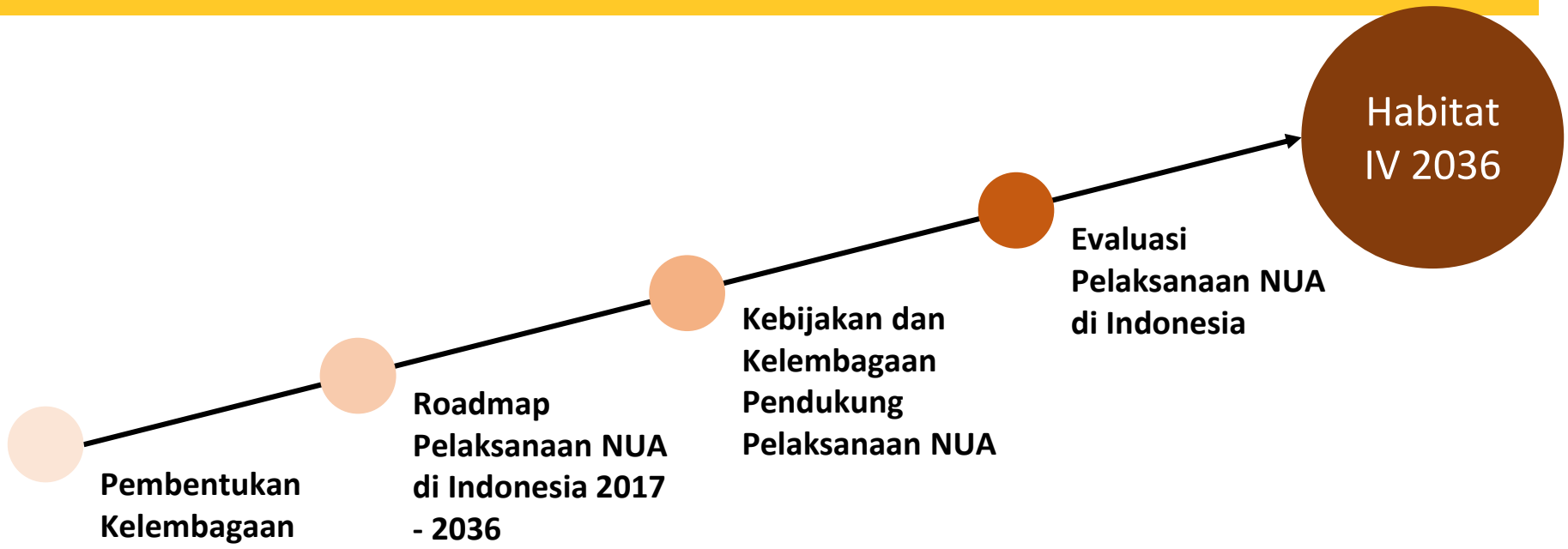

2017 - 2021	2022 - 2026	2027 - 2031	2031 - 2036
• Pembentukan kelembagaan NUA • Pengembangan kemitraan dengan Stakeholder terkait • Sosialisasi NUA • Penyusunan Rencana Aksi NUA • Advokasi NUA ke dalam RPJMN 2020 - 2024	• Implementasi NUA • *Building the Urban Governance Structure: Establishing a Supportive Framework* • *Sustainable Urban Development for Social Inclusion and Ending Poverty*	• Implementasi NUA • *Planning and Managing Urban Spatial Development* • *Sustainable and Inclusive Prosperity and Opporunities for all*	• Implementasi NUA • *Environmentally Sustainable and Resilient Urban Development* • Evaluasi Pelaksanaan NUA di Indonesia

OUTPUT IMPLEMENTASI NUA

1. Terjemahan NUA
(Maret, 2017)

Buku terjemahan NUA sudah dicetak dan dilaporkan pada Governing Council 26 di Nairobi, Kenya.

2. Quick Guide NUA (on going)

2017

- Buku Pengantar: New Urban Agenda
- Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar: Menyediakan sarana-prasarana dasar perkotaan yang layak untuk semua
- Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan: Membangun ketahanan kota yang berwawasan lingkungan
- Tata Kelola Perkotaan: Mengembangkan sistem pengelolaan kota yang inklusif, responsif dan efisien

2018

- Penataan Ruang Perkotaan
- Transportasi dan Mobilitas Perkotaan
- Pembangunan Ekonomi Perkotaan
- Pembangunan Sosial Budaya Perkotaan
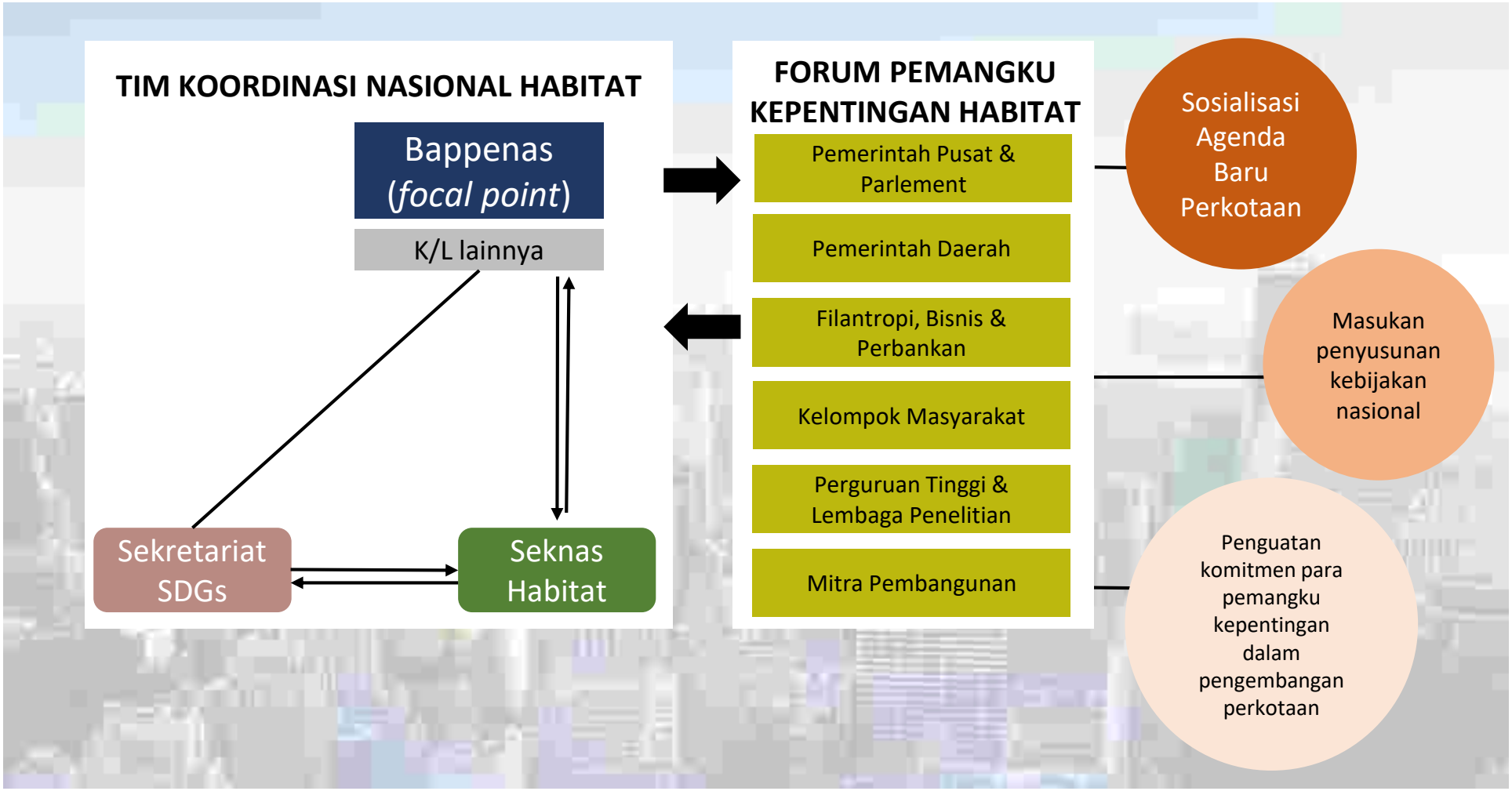
SKENARIO KELEMBAGAAN IMPLEMENTASI AGENDA BARU PERKOTAAN